

BAB IV

PROSES PENYELESAIAN KONFLIK BOLIVIA-BRAZIL

DALAM KASUS NASIONALISASI HIDROKARBON (2006-2007)

Konflik yang terjadi antara Bolivia dan Brazil, yang dikenal sebagai konflik hidrokarbon, pada dasarnya berakar dari konflik antara pemerintah Bolivia dengan Petrobras, perusahaan Brazil. Oleh karena Petrobras merupakan perusahaan milik negara, maka konflik pun meluas menjadi konflik antar negara.

Sebagai negara yang bersahabat, pemerintah kedua negara pun sepakat mengadakan negosiasi guna menyelesaikan konflik di antara keduanya. Permasalahan utama adalah keinginan renegotiasi kontrak oleh Bolivia dalam dekret nasionalisasinya. Negosiasi awal telah ditentukan oleh Bolivia selama 180 hari sesuai dengan isi dari dekret nasionalisasi Bolivia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam bab ini secara khusus akan dibahas mengenai negosiasi antara Bolivia dan Brazil dalam menyelesaikan konflik hidrokarbon. Selanjutnya, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai interaksi dan hasil-hasil atau kesepakatan antara pihak Bolivia dan Brazil.

A. Proses Penyelesaian Konflik Hidrokarbon Antara Bolivia dan Brazil

Pada awalnya Brazil menanggapi kebijakan nasionalisasi Bolivia dengan sikap yang cenderung keras. Namun pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Brazil menunjukkan sikap yang sedikit lunak. Hal ini tampak dalam

pernyataan resmi Brazil yang dimaksudkan untuk menghormati langkah nasionalisasi hidrokarbon Bolivia yang secara garis besar berisi beberapa poin berikut ini:⁷⁵

1. Brazil mengakui hak Bolivia untuk menasionalisasi kekayaan alamnya sesuai dengan keberadaannya sebagai negara yang berdaulat. Hal ini pada dasarnya sama dengan konstitusi Brazil yang memberikan kekuasaan pada negara untuk memegang kontrol penuh atas kekayaan alam negaranya.
2. Brazil akan bersikap tegas dan tenang dalam melindungi kepentingan Petrobras di setiap forum.
3. Brazil akan melakukan negosiasi yang dibutuhkan untuk menjamin terciptanya hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara kedua negara.
4. Jaminan suplai gas alam Brazil oleh komitmen politik kedua negara.
5. Secara lebih lanjut, isu peningkatan harga gas akan diselesaikan melalui negosiasi bilateral antara kedua negara.

Bagaimanapun juga, sebagai tetangga dan sahabat dekat Bolivia, pemerintah Brazil merasa bahwa menghargai tindakan pemerintah Bolivia adalah sesuatu keharusan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik di kawasan tersebut. Brazil tentu saja menginginkan adanya suatu kesepakatan melalui negosiasi yang dirasa sangat perlu demi terciptanya rangkaian kerjasama antara Brazil dan Bolivia yang berkelanjutan.

⁷⁵ Andre Correa & Michelle Ratton Sanchez, *Op. Cit.* hal. 21

Presiden Morales sendiri pada dasarnya memahami kepanikan Brazil. Morales pun sebelumnya menyempatkan diri untuk berdialog dengan Presiden Lula pemimpin Brazil. Dengan melalui telepon, Morales meyakinkan Lula bahwa suplai gas alam ke Brazil akan terjamin walaupun persoalan harga gas akan menjadi topik dalam negosiasi selanjutnya.⁷⁶

Pada sebuah kesempatan, Presiden Brazil, Lula da Silva, mengumumkan rencananya untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin regional kawasan Amerika Latin setelah sebelumnya memimpin rapat kabinet darurat membahas isu nasionalisasi selama 5 jam di Brazilia. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas mengenai energi di kawasan tersebut, khususnya masalah kebijakan nasionalisasi hidrokarbon Bolivia.⁷⁷

Pada waktu yang telah ditentukan, Presiden Lula pun mengadakan pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada 4 Mei 2006 di Puerto Igazu, Provinsi Misiones, Argentina, Presiden Lula beserta Hugo Chavez (Venezuela), Nestor Kirchner (Argentina), dan Evo Morales (Bolivia) bertemu dan bernegosiasi. Mereka bersama-sama membahas mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan nasionalisasi Bolivia.⁷⁸

Dalam negosiasi tersebut Morales secara otomatis telah menawarkan *opening bid* melalui poin-poin Dekrit Nasionalisasi, seperti kenaikan harga ekspor gas. Dalam proses perundingan dibahas pula mengenai kenaikan harga gas, akan

⁷⁶ Mario Osava, *Brazil Willing to Negotiate, After Nationalisation*, 3 Mei 2006, <http://ipsnews.net/news.asp?idnews=33103>, diakses 4 Maret 2011

⁷⁷ Jeb Blount & Fabio Alves, *Lula Backs Away From Bolivia Energy Fight; Regional Talks Set*, 2 Mei 2006, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ajGvcSeFjLw&refer=latin_america, diakses 4 Maret 2011

⁷⁸ Marcela Valente, *Neighbours Recognise Bolivia's 'Sovereign' Right to Nationalise Gas*, 4 Mei 2006, <http://ipsnews.net/news.asp?idnews=33134>, diakses 2 Maret 2011

tetapi kesepakatan yang diharapkan gagal dicapai. Kegagalan tersebut akibat sikap Brazil yang tetap mempertahankan sikapnya dalam menolak kenaikan harga gas yang dirasakan tinggi.⁷⁹

Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam dalam suasana yang tegang dan saling tidak percaya satu sama lain, khususnya antara Bolivia dan Brazil. Namun dalam prosesnya, negosiasi dilandasi dengan keterbukaan dan dialog yang tenang. Pada akhirnya pertemuan tersebut berujung pada tercapainya beberapa kesepakatan sebagai berikut:⁸⁰

1. Integrasi energi merupakan satu hal yang diperlukan dalam integrasi regional di kawasan Amerika Latin.
2. Kesepahaman terhadap kebutuhan untuk mempertahankan dan menjamin ketersediaan gas alam.
3. Pembahasan lanjutan mengenai harga gas harus dalam kerangka yang adil dan rasional. Negosiasi bilateral menjadi pilihan untuk membahas dampak kebijakan nasionalisasi Bolivia dan untuk membahas penetapan harga baru gas.
4. Argentina, Venezuela, dan khususnya Brazil berkomitmen untuk mendorong investasi di Bolivia dengan tujuan untuk menyokong pembangunan integral Bolivia.

Dalam suatu kesempatan di pertemuan tersebut, Chavez, Kirchner, dan Lula pun menyatakan dukungan dan penghormatan mereka terhadap kebijakan

⁷⁹ Jonathan Wheatley & Elizabeth Johnson, *Summit Fails To Resolve Bolivia Gas Uncertainty*, 4 Mei 2006, <http://www.ft.com/cms/s/2/34002e58-db8d-11da-98a8-0000779e2340.html#axzz1FcbD20Py>, diakses 4 maret 2011

⁸⁰ Marcela Valente. *Loc. Cit.*

nasionalisasi Morales. Morales pun menyatakan bersyukur atas solidaritas yang mereka berikan.⁸¹ Dari hasil yang telah disepakati bersama tersebut, tampak bahwasannya pertemuan dan negosiasi yang diadakan oleh Lula terutama berkaitan dengan masalah harga gas mengarah pada hasil yang positif. Tentu saja hal ini pun diharapkan dapat berlangsung dengan sama baiknya pada negosiasi-negosiasi berikutnya, khususnya antara Bolivia dan Brazil yang masih berada di dalam situasi konflik, supaya tidak berujung pada kerugian keduanya.

Dengan mengusung semangat kebersamaan dari pertemuan sebelumnya di Puerto Igazu, pihak Bolivia dan Brazil kembali mengadakan pertemuan pada 10 Mei 2006 di La Paz, Bolivia. Pertemuan yang dihadiri oleh Silas Rondeau (Menteri Pertambangan dan Energi Brazil), Andres Soliz Rada (Menteri Hidrokarbon Bolivia), Jose Sergio Gabrielli de Azevedo (Presiden Petrobras), dan Jorge Alvarado (Presiden YPF) tersebut mendiskusikan isu-isu yang terdapat dalam Supreme Decree No. 28701.⁸²

Pada kesempatan tersebut Silas Rondeau beserta Jose Sergio Gabrielli menyatakan bahwa mereka menghormati secara penuh keputusan pemerintah Bolivia dan rakyatnya yang tercantum dalam Supreme Decree No. 28701, dan menyatakan kesediaan mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang tepat.⁸³

Dalam rangka mewujudkan regulasi yang saling melengkapi, terjadi kesepakatan untuk melaksanakan rapat pada level teknis dan memfokuskan diri

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *President of Petrobras at La Paz Meeting*, Petrobras, 10 Mei 2006, http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2714_reuniao_em_la_paz_ing.pdf, diakses 21 Januari 2011

⁸³ *Ibid.*

sebesar 60%.⁸⁷ Bagi pemerintah Brazil, kenaikan harga gas yang diinginkan oleh Morales dirasakan cukup berat. Apabila pemerintah Brazil menyatakan bersedia, maka kenaikan harga ini mempunyai kecenderungan dapat menghambat upaya Brazil dalam pembangunan dan pemenuhan energi nasionalnya.

Pada hari yang sama, Petrobras pun segera melakukan pembelaan terhadap tuduhan tersebut yang dinyatakan dan dipublikasikan secara resmi dalam sebuah *press release* (lihat Lampiran No. 6). Pembelaan tersebut terbagi dalam poin-poin berikut ini:⁸⁸

1. Petrobras selalu beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di setiap negara dimana Petrobras beroperasi.
2. Bisnis Petrobras di Bolivia merupakan hasil dari perjanjian bilateral antara Bolivia dan Brazil.
3. Sebagai hasil perjanjian tersebut, Petrobras memberikan sokongan dana dan melanjutkan pembangunan pipa Gasbol, berinvestasi dalam eksplorasi, dalam kegiatan produksi di San Alberto dan San Antonio. Sebagai konsekuensi, Petrobras telah membeli gas Bolivia sejak tahun 1999. Petrobras pun telah berkontribusi terhadap perekonomian Bolivia dengan menyediakan lapangan kerja dan membayar pajak di Bolivia.
4. Pengesahan dan pelaksanaan kontrak tersebut dijalankan oleh

⁸⁷ Peter Muello, *Brazilian Oil Company Denies Bolivian Accusations; Petrobras 'Indignant' Over Claims of Illegal Activities*, 12 Mei 2006, http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=291525&rel_no=1, diakses 2 Maret 2011

⁸⁸ *Petrobras Repudiates Bolivian Government Declarations*, Petrobras, 11 Mei 2006, http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2717_bolivia_repudio_ing.pdf, diakses 21 Januari 2011

Petrobras dengan menghormati sepenuhnya kerangka legal yang berlaku di Bolivia.

Secara garis besar, Petrobras berupaya menekankan kepada pemerintah Bolivia bahwasannya sudah menjadi suatu keharusan dalam tubuh Petrobras untuk selalu tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan setiap operasinya.

Sehari sesudahnya pada 12 Mei 2006, masih dalam Konferensi Wina, Morales menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asing (termasuk Petrobras) tidak mempunyai alasan untuk meminta ataupun mendapatkan kompensasi, sebab rakyat Bolivia belum mendapatkan keuntungan dari teknologi yang digunakan di sektor minyak dan gas.⁸⁹ Pernyataan Morales tersebut tentu saja semakin menaikkan ketegangan antara Bolivia dan Brazil. Selanjutnya pada 13 Mei 2006, di sela-sela Konferensi Wina, pemerintah Brazil mengadakan pertemuan dengan Morales untuk mengatasi perselisihan di antara mereka yang dirasa semakin meruncing berkaitan dengan keputusan nasionalisasi energi Bolivia.⁹⁰

Pada kesempatan tersebut, Menlu Brasil, Celso Amorim, mengancam bahwa pemerintah Brazil akan menarik duta besarnya dari La Paz jika Bolivia tetap bersikeras akan menyita aset-aset Petrobras tanpa memberikan kompensasi dalam proses nasionalisasi sektor energinya.⁹¹ Ancaman tersebut berhasil membuat Morales berpikir ulang, sehingga Morales pun menarik kembali ucapannya dan menyatakan akan melanjutkan negosiasi mengenai mekanisme

⁸⁹ Hasyim, *KTT UE-Amerika Latin: Blair Minta Pertanggungjawaban*, 13 Mei 2006, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=143715>, diakses 8 Desember 2010

⁹⁰ Hasyim, *KTT UE-Amerika Latin: Brasil Dan Bolivia Tegang*, 14 Mei 2006, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=143815>, diakses 8 Desember 2010

⁹¹ *Ibid.*

nasionalisasi serta kenaikan harga gas.

Kenaikan harga gas selanjutnya dinegosiasikan dalam sebuah pertemuan di La Paz, Bolivia pada 29 Juni 2006. Petrobras secara formal menginginkan supaya YPFB bersedia melakukan tinjauan ulang terhadap rencana kenaikan harga gas alamnya.⁹² Negosiasi tersebut mengalami jalan buntu, sebab tidak terjadi kesepakatan di antara keduanya. Keduanya pun sepakat mengadakan negosiasi lanjutan yang akan dilaksanakan pada 10-14 Juli 2006 di kota Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.⁹³

Selanjutnya, dalam negosiasi tersebut kembali dibahas mengenai isu kenaikan harga gas yang diajukan oleh Bolivia. Pihak Bolivia bersikukuh mempertahankan keputusannya untuk menaikkan harga gas demi kepentingan nasional Bolivia untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. YPFB secara formal menginginkan kenaikan harga gas sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Bolivia yang baru berkaitan dengan kekayaan alam negara, termasuk di dalamnya nasionalisasi hidrokarbon. Presiden Evo Morales menambahkan bahwa pemerintahannya menginginkan kenaikan harga tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya.⁹⁴

Petrobras memberikan tanggapan dengan menekan YPFB untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan harga gas tersebut. Petrobras menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Bolivia untuk menaikkan

⁹² *Petrobras Listens to YPFB Arguments and Defines a Negotiation Timeline*, TB Petroleum, 30 Juni 2006, <http://www.tbpetroleum.com.br/news/sec/id/10815/titulo/petrobras-listens-to-ypfb-arguments-and-defines-a-negotiation-timeline>, diakses 21 Januari 2011

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Business News Americas Staff Reporters, Petrobras Opposes YPFB Gas Price Increase*, 14 Juli 2006, http://www.bnamericas.com/news/oilandgas/Petrobras_opposes_YPFB_gas_price_increase, diakses 21 Januari 2011

harga gas tersebut. Petrobras menambahkan bahwa gas Bolivia yang diekspor ke Brazil telah berdasar pada standar harga minyak internasional sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kedua negara.⁹⁵

Dalam negosiasi kali ini pun tidak ditemui kesepakatan mengenai harga gas di antara pihak Bolivia dan Brazil. Petrobras menawarkan batas kenaikan harga gas yang diekspor sebesar US\$ 4/MBTU. Namun YPFB menginginkan kenaikan harga gas tersebut sampai dua kali lipat dari harga yang ditetapkan Petrobras. YPFB menginginkan kenaikan harga dari harga US\$ 3,80/MBTU menjadi US\$ 8/MBTU. Harga tersebut belum termasuk biaya transportasi sebesar US\$ 1,7/MBTU. Pihak Bolivia pun mengancam tidak akan melanjutkan negosiasi apabila tidak terdapat suatu kemungkinan untuk menaikkan harga gas.⁹⁶

YPFB dan Petrobras pada akhirnya sepakat untuk melanjutkan negosiasi yang cukup panjang tersebut pada 24-28 Juli 2006 di Rio de Janeiro, Brazil.⁹⁷ Dalam pertemuan tersebut pun masih belum dicapai kesepakatan harga gas yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Selama proses perundingan berlangsung, YPFB dan Petrobras hanya saling menyampaikan dan saling menyimak argumen satu sama lain.⁹⁸

Belum adanya titik temu antara YPFB dan Petrobras menjadikan negosiasi yang berlangsung menjadi semakin panjang. Dalam tingkatan negosiasi ini, suatu dialog yang tenang dan pengertian di antara kedua pihak sangat dibutuhkan dalam

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Petrobras And YPFB Wrap-Up the Third GSA Negotiation Stage*, TB Petroleum, 28 Juli 2006, <http://www.tbpetroleum.com.br/news/see/id/10987/titulo/petrobras-and-ypfb-wrap-up-the-third-gsa-negotiation-stage>, diakses 21 Januari 2011

pemecahan masalah. Dengan demikian, apabila keduanya telah mencapai kesepakatan akhir mengenai harga ekspor gas, dipastikan kesepakatan tersebut akan memuaskan seluruh pihak yang terlibat yaitu Bolivia dan YPFB serta Brazil dan Petrobras. Apabila pada akhirnya tidak ditemui suatu kesepakatan, kemungkinan besar pemerintah Brazil akan mengajukan kasus nasionalisasi hidrokarbon Bolivia ke Badan Arbitrasi Internasional, karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh Brazil.

Negosiasi lanjutan atas harga ekspor gas pun dilaksanakan pada 7-11 Agustus 2006 di Rio de Janeiro, Brazil.⁹⁹ Dalam pertemuan kali ini, pemerintah Bolivia tetap berusaha untuk menaikkan harga ekspor gas sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi hidrokarbon, karena kesepakatan harga yang ada dianggap terlalu rendah. Petrobras pun menyatakan bahwasannya para konsumen Petrobras tidak akan menerima kenaikan harga tersebut. Pada akhirnya pihak Bolivia dan Petrobras khususnya YPFB dan Petrobras sepakat untuk memperpanjang proses perundingan selama 60 hari.¹⁰⁰ Dengan demikian, ketentuan ini memberlakukan negosiasi masalah harga ekspor gas berlanjut sampai dengan pertengahan November 2006.

Telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasannya Brazil sangat bergantung pada hidrokarbon Bolivia, untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya, sebagaimana Bolivia sangat bergantung pada investasi Brazil. Kehilangan investasi besar dapat mengancam aktivitas eksplorasi dan produksi gas alam di Bolivia. Secara tidak langsung, hal ini tentu saja akan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Petrobras, YPFB to Extend Gas Contract Talks 60 Days*, Business News Americas, 16 Agustus 2006, http://images.rigzone.com/news/article.asp?a_id=35227, diakses 21 Januari 2011

berdampak negatif terhadap ketersediaan pasokan gas alam Bolivia ke Brazil. Kepentingan-kepentingan itulah yang berusaha diperjuangkan oleh kedua belah pihak dalam negosiasi tersebut dan juga dalam perpanjangan negosiasi harga ekspor gas ke depan. Pada akhirnya, tambahan jangka waktu negosiasi menjadi opsi dalam perundingan tersebut demi terciptanya kesepakatan akhir yang seimbang sesuai dengan posisi masing-masing di sektor hidrokarbon Bolivia.

Memasuki bulan-bulan terakhir menjelang batas waktu negosiasi, hubungan Bolivia dan Brazil kembali memburuk. Pada 12 September 2006, Menteri Hidrokarbon Bolivia, Andres Soliz Rada, mengeluarkan sebuah Resolusi No. 207/2006 yang dianggap merugikan Petrobras dan perekonomian Brazil. Resolusi ini menetapkan bahwa YPFB perusahaan Bolivia akan menggunakan hak miliknya terhadap minyak dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) serta hasil hidrokarbon lainnya.¹⁰¹ Penerapan aturan dalam Resolusi tersebut termasuk untuk seluruh rangkaian aktifitas produksi, transportasi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran.¹⁰²

Namun dalam kenyataannya, melalui Resolusi yang dimaksudkan sebagai bagian dari Supreme Decree 28701 tersebut, Bolivia mengambil alih dan mengendalikan secara penuh seluruh aktifitas produksi tanpa memberikan ganti rugi.¹⁰³ Pengambilalihan hampir keseluruhan proses aktifitas ini pada nantinya akan menjadikan Petrobras sebatas perusahaan penyedia jasa. Hal ini dipastikan

¹⁰¹ Sarah John de Sousa, *Op. Cit.* hal. 4

¹⁰² *Situation in Bolivia*, Petrobras, 14 September 2006, http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2827_situacao_na_bolivia_ingl.pdf, diakses 21 Januari 2011

¹⁰³ Pedro Alberto Costa Braga de Oliveira, *Petrobras Arbitration III (Petrobras v. Bolivia)*, dalam *Brazilian Arbitration Law*, 14 September 2006, <http://arbitrationlaw.blogspot.com/2006/09/petrobras-arbitration-iii-petrobras-v.html>, diakses 5 Maret 2011

akan memotong habis pendapatan Petrobras.

Brazil pun seketika menolak resolusi tersebut karena sudah dipastikan bahwa dampaknya sangat serius. Presiden Lula da Silva menolak keras dengan ancaman. Melalui telepon, Presiden Lula mengancam akan membekukan negosiasi yang sedang berlangsung secara unilateral.¹⁰⁴ Sejalan dengan pernyataan pemerintah, Petrobras pun secara resmi menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut (lihat Lampiran No. 7).¹⁰⁵ Lula pun selanjutnya mengancam akan mengajukan kasus tersebut ke badan arbitrase internasional.¹⁰⁶

Situasi ini pun menimbulkan kepanikan di Senat Bolivia karena dianggap mengancam kemajuan rencana nasionalisasi. Pada 23 Agustus 2006, Senat yang notabene dikontrol oleh pihak oposisi yang berlawanan pandangan dengan kebijakan pemerintah pun mengecam Andres Soliz.¹⁰⁷ Akibat tekanan, Andres Soliz beserta timnya pun mengundurkan diri secara resmi pada 15 September 2006. Jabatan Soliz selanjutnya diduduki oleh Carlos Villegas, seorang politisi yang dianggap lebih moderat dalam menghadapi isu hidrokarbon.¹⁰⁸

Dalam konferensi pers, Menteri Hidrokarbon yang baru, Villegas, menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak akan dihapus namun dibekukan untuk kurun waktu yang tidak ditentukan. Villegas menambahkan, pada dasarnya Bolivia dan Brazil saling membutuhkan sehingga negosiasi dianggap diperlukan.

¹⁰⁴ Sarah John de Sousa, *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ *Situation in Bolivia, Loc. Cit.*

¹⁰⁶ José Wilson Miranda, *Brazil Threatens to Use Arbitration Court After New Bolivian Surprise*, 14 September 2006, <http://www.brazzilmag.com/component/content/article/40/7236-brazil-threatens-to-use-arbitration-court-after-new-bolivian-surprise.pdf>, diakses 5 Maret 2011

¹⁰⁷ Federico Fuentes, *Bolivia: Morales Overcomes Gas Crisis*, <http://www.greenleft.org.au/node/35202>, diakses 7 februari 2011

¹⁰⁸ Sarah John de Sousa, *Loc. Cit.*

Selanjutnya Villegas menyatakan bahwa Petrobras sangat kuat di negara Andean sejak kehadirannya dalam seluruh aktifitasnya di sektor hidrokarbon, dan Petrobras merupakan satu-satunya pasar utama dalam beberapa tahun ke depan, mengingat Brazil bergantung pada persediaan energi Bolivia.¹⁰⁹

Presiden Brazil, Lula da Silva, dalam negosiasi sejauh ini benar-benar menunjukkan ketegasan dalam melindungi kepentingan Petrobras dan negaranya. Ancaman yang dikeluarkan pun sanggup memaksa pemerintah Bolivia untuk merombak kabinetnya. Tampak bahwa pemerintah Bolivia sangat memahami dan sangat khawatir terhadap ancaman Brazil. Apabila ancaman tersebut benar-benar direalisasikan oleh Brazil, maka sudah dipastikan bahwa posisi dan keadaan Bolivia akan terancam.

Pergantian kabinet dalam tubuh pemerintahan Evo Morales tersebut merupakan langkah positif pemerintah Bolivia sebagai suatu kesungguhan dalam proses pencapaian kesepakatan dengan Brazil. Pemerintah Brazil pun menyatakan pergantian menteri hidrokarbon Bolivia merupakan tanda bahwa Bolivia ingin melanjutkan negosiasi, sehingga hal ini memungkinkan Petrobras untuk melanjutkan operasi di Bolivia.¹¹⁰

Lula da Silva kembali menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan kepentingannya. Pada proses perundingan berikutnya, 21 September 2006, Presiden Lula da Silva mengingatkan pemerintah Bolivia untuk memahami betapa pentingnya Brazil terhadap sumberdaya Bolivia. Dalam sebuah wawancara

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Alexandre Spatuzza, *Change in Hydrocarbons Ministry Could Help Bilateral Talks*, 20 September 2006, http://www.bnamericas.com/news/oilandgas/Change_in_hydrocarbons_ministry_could_help_bilateral_talks, diakses 9 Februari 2011

dengan stasiun TV Brazil, O'Globo, Presiden Lula menyatakan bahwa Morales tidak bisa seterusnya menghunuskan pedang ke kepala Brazil karena mempunyai gas; Brazil pun bisa menghunuskan pedang ke kepala Morales karena Brazil membeli sebagian besar gas alam Bolivia, dan apabila gas tersebut tidak dijual kepada Brazil, akan sulit bagi Bolivia untuk menemukan pembelinya.¹¹¹

Pernyataan Lula tersebut menyusul pernyataan Villegas, Menteri Hidrokarbon Bolivia, bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatan dalam dekrit nasionalisasi pada perusahaan-perusahaan energi asing, terutama pada Petrobras milik Brazil yang terancam kehilangan dua kilang minyaknya dengan tanpa kompensasi. Sebelumnya Villegas pun menyatakan bahwa pada 28 Oktober 2006, yaitu pada deadline renegotiasi kontrak, tidak akan ada periode negosiasi tambahan dan dekrit nasionalisasi akan sepenuhnya dijalankan. Villegas yakin bahwasannya perusahaan-perusahaan asing akan menerima kontrak dalam nasionalisasi.¹¹²

Sementara itu, masalah harga ekspor gas masih belum menemui titik temu dalam perundingan di Santa Cruz Bolivia pada 29 September 2006. Dalam negosiasi lanjutan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Petrobras dan YPFB.¹¹³ Ketika memasuki bulan Oktober, Presiden Lula mengendorkan keterlibatannya dalam negosiasi disebabkan kegiatan pemilu presiden yang sedang dihadapinya. Dalam pemilu putaran pertama pada 1 Oktober 2006, Lula gagal mendapatkan

¹¹¹ "Lula Reminds Bolivia the "Importance of Brazil"", Mercosur, 21 September 2006, <http://en.mercopress.com/2006/09/21/lula-reminds-bolivia-the-importance-of-brazil>, diakses 5 Maret 2011

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Business News Americas Staff Reporters, *Petrobras, YPFB Start Preparatory Talks Over Nationalization*, http://www.bnamericas.com/news/oilandgas/Petrobras,_YPFB_start_preparatory_talks_over_nationalization, diakses 7 Maret 2011

suara mayoritas sehingga harus menjalani putaran kedua pada 29 Oktober 2006. Pada periode ini, Kementerian Brazil dan Petrobras menjalankan negosiasi secara intensif bersama YPFB dan pemerintah Bolivia.

Bulan Oktober merupakan masa yang sangat menentukan dalam proses nasionalisasi hidrokarbon Bolivia. Setelah melalui beberapa tahapan negosiasi yang panjang, penandatanganan persetujuan oleh beberapa perusahaan minyak asing terutama Petrobras Brazil, sangat diharapkan oleh Bolivia. Tidak terdapat penjadwalan ulang atau perpanjangan deadline seperti halnya perpanjangan negosiasi harga ekspor gas alam Bolivia ke Brazil. Bagi perusahaan yang tidak bersedia melakukan renegotiasi kontrak pada akhir bulan Oktober, harus segera menghentikan operasinya di Bolivia, tidak terkecuali Petrobras.

Pada minggu-minggu terakhir kemajuan demi kemajuan dicapai oleh kedua belah pihak dalam negosiasi intensif. Pada 20 Oktober 2006, Carlos Villegas mengingatkan kembali kepada perusahaan gas asing khususnya Petrobras untuk segera menandatangani kontrak baru dan apabila terjadi kegagalan kontrak maka aset mereka di Bolivia akan diambil alih oleh YPFB.¹¹⁴ Selanjutnya pada 23 Oktober dalam negosiasi di La Paz, Bolivia, Menteri Energi dari Bolivia dan Brazil yaitu Carlos Villegas dan Silaz Rondeau mengadakan perundingan. Dalam perundingan yang diadakan oleh pihak pemerintah Brazil dan Petrobras tersebut tercipta kemajuan dalam pencapaian kesepakatan nasionalisasi.¹¹⁵

Pada tanggal 27 Oktober 2006, Petrobras menerima permintaan Pemerintah Bolivia mengenai peningkatan pajak atas hidrokarbon dari 50%

¹¹⁴ *Brazil and Bolivia Make Progress*, Mercosur, 24 Oktober 2006, <http://en.mercopress.com/2006/10/24/brazil-and-bolivia-make-progress>, diakses 7 Januari 2011

¹¹⁵ *Ibid.*

menjadi 82%. Peraturan tersebut berlaku terutama di kilang minyak San Alberto dan San Antonio, yang merupakan tempat investasi penting bagi Petrobras. Agar asetnya tidak diambil alih oleh pemerintah Bolivia, Petrobras pun sepakat bahwa YPFB berhak mengambil alih kontrol pada kilang minyak Brasil di wilayah Bolivia.¹¹⁶

Akhirnya pada 28 Oktober 2006 di La Paz, Bolivia, Presiden Morales memenuhi ambisinya dalam menasionalisasi minyak dan gas. Hidrokarbon Bolivia dapat dimiliki sepenuhnya oleh Bolivia sehingga tidak ada halangan apapun bagi rakyat Bolivia untuk menikmati kekayaan alam mereka dengan bebas. Petrobras bersama perusahaan-perusahaan asing lainnya seperti Repsol YPF (Spanyol), Total SA (Perancis), dan Vintage Petroleum (AS) pada akhirnya bersedia menandatangani kontrak baru.¹¹⁷ Mereka menandatangani 44 *Contratos de Operacion* (Kontrak Operasi), tunduk pada ketentuan nasionalisasi Morales.¹¹⁸ Kontrak tersebut selanjutnya dibawa ke hadapan kongres Bolivia untuk mendapat persetujuan dari Kongres.

Bersamaan dengan momen renegotiasi kontrak ini, pemerintah Bolivia mengeluarkan Supreme Decree No. 28900. Di dalamnya berisi ketetapan resmi bahwa perusahaan-perusahaan asing (termasuk Petrobras Brazil) dapat melanjutkan operasinya di Bolivia sesuai dengan ketentuan dalam Supreme

¹¹⁶ Roberto Stefanini, *Brazil: the Agreement for Bolivian Gas Supplies*, 1 March 2007, hal. 2, <http://uk.equilibri.net/pdf.php?documento=6141>, diakses 14 Agustus 2011

¹¹⁷ *Bolivia Completes Oil and Gas Nationalization*, Mercosur, 30 Oktober 2006, <http://en.mercopress.com/2006/10/30/bolivia-completes-oil-and-gas-nationalization>, diakses 5 Maret 2011

¹¹⁸ Maria Victoria Vargas, *Bolivia's New Contract Terms: Operating Under the Nationalization Regime*, OGEL, 2007, hal. 1, http://www.kslaw.com/Library/publication/MVargas_OGEL_BolivianContractTerms.pdf, diakses 1 Desember 2011

Decree No. 28701.¹¹⁹

Momen tersebut menjadi kemenangan politik bagi Morales. Morales pun bergabung dengan wakil-wakil perusahaan asing dalam upacara penandatanganan kontrak baru, dan memberikan pujian kepada mereka atas kesediaan mereka menjadi rekan Bolivia untuk masa mendatang. Morales pun menyatakan bahwa pemerintah Bolivia membutuhkan rekan-rekan kerja yang baik untuk membantu Bolivia dalam memecahkan permasalahan sosial di Bolivia.¹²⁰

Secara khusus dalam kaitannya dengan Brazil, Morales memberikan pernyataan hangat. Sebagai rakyat Bolivia, Morales mengakui bahwa Brazil merupakan satu-satunya pemimpin di kawasan Amerika Latin, dan hal itulah yang menyebabkan bisnis dengan Brazil menjadi sangat penting.¹²¹ Morales menambahkan bahwa Bolivia harus hidup bersama dengan Brazil dalam “pernikahan tanpa perceraian”, karena saling membutuhkan satu sama lain. Morales pun menutup pernyataannya dengan menyampaikan dukungan dan kepercayaan terhadap Presiden Lula sahabatnya, yang sedang mengikuti pemilu presiden Brazil putaran kedua.¹²²

Melalui pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipahami bahwasannya Bolivia sangatlah bergantung pada investasi asing untuk menangani permasalahan sosial domestik yang disebabkan kemiskinan akibat kapitalisasi di masa lalu.

¹¹⁹ “New Hydrocarons Law of Bolivia”, dalam *Form 6-K, Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule of the Securities Exchange Act of 1934*, Petrobras, 13 juni 2007, hal. 47, [http://google.brand.edgar-online.com/DisplayFilingInfo.aspx?Type=HTML&text=%2526t%253bNEAR%252f4%2526gt%253b\(%22PETROBRAS%22%2C%22ENERGIA%22\)&FilingID=5242002&ppu=%2FpeopleFilingResults.aspx%3FpersonID%3D4169672](http://google.brand.edgar-online.com/DisplayFilingInfo.aspx?Type=HTML&text=%2526t%253bNEAR%252f4%2526gt%253b(%22PETROBRAS%22%2C%22ENERGIA%22)&FilingID=5242002&ppu=%2FpeopleFilingResults.aspx%3FpersonID%3D4169672), diakses 7 Februari 2011

¹²⁰ *Bolivia Completes Oil and Gas Nationalization. Loc. Cit.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

Kekurangan sumber dana dan sumber daya manusia menyebabkan Bolivia menaruh harapan besar pada investor asing. Tampak pula bahwa pemerintah Bolivia berusaha untuk tetap menjaga persahabatan dan stabilitas politik di kawasan Amerika Latin, terutama dengan Brazil.

Pada periode ini, proses nasionalisasi yang dicanangkan oleh Morales belum sepenuhnya selesai. Mengenai harga ekspor gas, kesepakatan di antara Bolivia dan Brazil pun masih belum tercapai meskipun telah mendekati akhir November 2006, sehingga negosiasi harus diperpanjang untuk kesekian kalinya. Isu harga gas menjadi isu yang sensitif bagi kedua negara. Resiko kenaikan harga yang tinggi sangat memungkinkan terjadinya penolakan di sektor industri Brazil. Begitu pula dengan Bolivia, negara ini sangat bergantung pada hasil ekspor gas alamnya. Dengan demikian perlu strategi yang baik untuk mendapatkan kesepakatan yang memuaskan.

Selanjutnya pada 28 November 2006, Kongres Bolivia menyetujui 44 Kontrak Operasi atau disebut juga dengan kontrak eksplorasi dan produksi, yang telah ditandatangani dalam renegotiasi kontrak pada 28 Oktober 2006.¹²³ Namun karena terdapat kesalahan administrasi, maka kontrak tersebut belum bisa diratifikasi sehingga proses ratifikasi harus mengalami penundaan.

Setelah melalui negosiasi berbulan-bulan, pada 14 Februari 2007, di Brazilia, Lula da Silva Presiden Brasil dan Evo Morales Presiden Bolivia menandatangani perjanjian penting mengenai harga ekspor gas alam Bolivia.¹²⁴ Perjanjian tersebut meresmikan peningkatan harga ekspor gas alam Bolivia ke

¹²³ "New Hydrocarbons Law of Bolivia", *Loc. Cit.*

¹²⁴ Roberto Stefanini, *Op. Cit.* hal. 1

Brasil. Brazil setuju untuk membayar US\$ 4,20/MBTU untuk ekspor gas Bolivia.¹²⁵

Akhirnya pada 2 Mei 2007, Kontrak Operasi antara Bolivia dan Brazil telah berhasil diratifikasi.¹²⁶ Dengan demikian proses nasionalisasi hidrokarbon Bolivia sepenuhnya telah selesai dijalankan. Konflik terbuka antara Bolivia dan Brazil pun dapat dihindari setelah kedua negara melangsungkan negosiasi melalui proses yang panjang, menegangkan, dan berbelit-belit.

B. Hasil Renegosiasi Kontrak YPFB dengan Petrobras

Pada 28 Oktober 2006 telah dicapai kesepakatan antara Petrobras dengan YPFB yang tercantum dalam Kontrak Operasi sesuai dengan ketentuan dalam Supreme Decree 28701. Kontrak Operasi merupakan kontrak antara YPFB dan perusahaan minyak lain (kontraktor) dimana kontraktor sanggup melakukan operasi perminyakan di wilayah kontrak tertentu dengan resiko dan biaya sendiri, menanggung semua biaya dan menyediakan seluruh personil, teknologi, fasilitas, peralatan dan modal yang dibutuhkan.¹²⁷ YPFB tidak menanggung kerugian atau bertanggung jawab dalam eksploitasi minyak ataupun hasil produksinya, dan kontraktor tidak berhak memiliki cadangan apapun atau hidrokarbon yang dihasilkan.¹²⁸

Kontrak Operasi antara YPFB dan Petrobras mencakup beberapa hal

¹²⁵ *Brazil and Bolivia Sign Natural Gas-Price Agreement*, 20 Februari 2007, http://www.gasandoil.com/news/ms_america/45add5f351c4bc7348fa664fae427650, diakses 11 Januari 2011

¹²⁶ "New Hydrocarbons Law of Bolivia", *Loc. Cit.*

¹²⁷ M.V. Vargas, *Bolivia's New Contract Terms: Operating Under the Nationalization Regime*. Dalam *Oil, Gas & Energy Law Intelligence*, 2007, hal. 2, http://www.kslaw.com/Library/publication/MVargas_OGEL_BolivianContractTerms.pdf, diakses 1 Desember 2011

¹²⁸ *Ibid.*

sebagai berikut (selengkapnya lihat Lampiran No. 8): (1) Lamanya kontrak yang berlaku, (2) Periode dari kegiatan eksplorasi dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, (3) Sistem komersialisasi, (4) Periode eksploitasi lahan-lahan yang relevan, (5) Kepemilikan dan kontrol atas sektor Hidrokarbon, (6) Pembayaran royalti, pajak dan ganti rugi, (7) Pemberian kompensasi untuk kontraktor, (8) Penjaminan, (9) Penugasan dan pergantian kontrol, (10) Abandonment, dan (11) Arbitrasi dan hukum yang dapat diaplikasikan.¹²⁹

Secara garis besar, kontrak YPFB dengan Petrobras mencakup beberapa hal berikut:¹³⁰

1. Petrobras tetap akan bertanggung jawab dalam semua operasi di blok San Alberto, San Antonio, Rio Hondo, Ingre dan Irenda dimana Petrobras beroperasi sebelumnya.
2. Petrobras tetap dapat melanjutkan kepemilikan aset-asetnya di Bolivia.
3. Masa kontrak berlaku valid selama 30 tahun, dimulai pada tanggal disetujuinya kontrak tersebut oleh Kongres Bolivia.

Berdasarkan pada kontrak yang telah disepakati, yang akan Petrobras dapatkan adalah:¹³¹

1. Jaminan operasi di lapangan utama yang menyuplai gas alam ke Brazil (di San Antonio dan San Alberto).
2. Keuntungan ekonomi sebesar 15%.
3. Posisi yang strategis di Bolivia.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 2-5

¹³⁰ *Petrobras-YPFB Contract*, Petrobras, 31 Oktober 2006, hal. 6, http://www2.petrobras.com.br/ri/pdf/ContratoPetrobras_YPFB_Ing.pdf, diakses 4 Desember 2010

¹³¹ *Ibid.* hal. 3

4. Kontrak sepanjang 30 tahun.

Sedangkan YPFB, mengacu pada kontrak tersebut, akan mendapatkan keuntungan yaitu:¹³²

1. Kepemilikan seluruh hidrokarbon.
2. Sebagai agen komersialisasi utama.
3. Kontrol yang lebih ketat terhadap proses operasi perusahaan-perusahaan minyak asing.
4. Tidak akan berpartisipasi dalam investasi dan pembiayaan.

Dalam aspek kenaikan harga gas, Bolivia dan Brazil pun telah mencapai kesepakatan akhir setelah melewati perundingan yang panjang. Harga ekspor gas alam Bolivia ke Brazil yang semula sebesar US\$ 3,80/MBTU, pada akhirnya dinaikkan menjadi US\$ 4,20/MBTU dalam kesepakatan kontrak baru. Harga ini jauh lebih rendah dari keinginan awal Bolivia yang mematok harga gas sebesar US\$ 8/MBTU.

Di samping kenaikan harga gas, kesepakatan mengenai kompensasi aset Petrobras pun tercapai. Bolivia memberikan kompensasi kepada Petrobras sebesar US\$ 112 juta atas dua asetnya yaitu Gualberto Vilarroel Refinery di Cochabamba dan Guillermo Elder Bell Refinery di Santa Cruz, setelah berhasil direnasionalisasi oleh Bolivia. Keduanya merupakan kilang minyak yang dulunya merupakan milik YPFB yang dibeli oleh Brazil pada tahun 1999.¹³³

Mengenai perubahan kontrak akibat kebijakan nasionalisasi hidrokarbon antara YPFB dan Petrobras, dapat dilihat melalui perbandingan antara kontrak

¹³² *Ibid.* hal. 5

¹³³ Andre Correa & Michelle Ratton Sanchez, *Op. Cit.* hal. 25

lama (*Shared Risk Contract*) dengan kontrak yang baru (*Operation Contract*) seperti yang ditampilkan dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Perbandingan *Shared Risk Contract* dengan *Operation Contract*

Shared Risk Contract	Operation Contract
Operator: Petrobras	Operator: YPFB
Komersialisasi: 1. Via YPFB khusus ekspor ke Brazil 2. Petrobras secara langsung pada kasus lain	Komersialisasi: via YPFB
Remunerasi: Petrobras menerima total pendapatan yang sudah termasuk dalam perhitungan pajak dan royalti.	Remunerasi: 1. Petrobras menerima sebagian dari total pendapatan sesuai dengan biaya, penyusutan dan keuntungan 2. YPFB menerima sebagian dari total pendapatan sesuai dengan royalti, pajak dan transportasi
Pemilik hidrokarbon: Petrobras	Pemilik hidrokarbon: YPFB
Kepemilikan aset: Petrobras	Kepemilikan aset: Petrobras. Diambil YPFB pada akhir kontrak kerjasama
Solusi sengketa/konflik: 1. Arbitrasi sesuai dengan hukum Bolivia dan prosedur dan peraturan dari International Chamber of Commerce (ICC) di La Paz. 2. Kantor cabang lembaga peradilan Bolivia 3. perjanjian bilateral Belanda-Bolivia tentang perlindungan investasi asing.	Solusi sengketa/konflik: Tidak ada perubahan

Sumber: Petrobras - YPFB Contract, 31 Oktober 2006

C. Interaksi Bolivia dengan Brazil dalam Proses Resolusi Konflik

Akar permasalahan yang menyeret Bolivia dan Brazil ke dalam konflik hidrokarbon pada dasarnya adalah isu hidrokarbon. Interaksi antara kedua negara dalam proses penyelesaian konflik pun tidak terlepas dari kepentingan masing-masing atas hidrokarbon yang merupakan landasan setiap tindakan dan respon kedua belah pihak. Kepentingan masing-masing pihak saling berbenturan pada isu gas sehingga menciptakan konflik kepentingan dimana keduanya berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing. Dengan adanya kepentingan dan persamaan isu, maka terdapat kesempatan bagi resolusi konflik melalui negosiasi untuk diterapkan dalam menyelesaikan konflik di antara kedua negara.

Dalam proses negosiasi dapat dilihat aktivitas tawar menawar yang cukup intens dari kedua belah pihak yang pada tingkatan tertentu diiringi dengan ancaman untuk menekan kebijakan satu sama lain. Bolivia dianggap lebih unggul dengan melakukan *opening bid* terlebih dahulu, yaitu melalui poin-poin yang tercantum dalam Supreme Decree 28701. Hal ini pada akhirnya menyebabkan posisi awal Bolivia dianggap sebagai patokan utama, yang membuat Brazil tidak dapat memasang posisi yang terlalu jauh dari tuntutan awal Bolivia. Bolivia telah menetapkan komitmen untuk bersikap sesuai dengan kebijakan yang sudah dijelankannya. Pada perkembangannya, Brazil yang merasa telah ditantang berusaha mempertahankan komitmen dalam menolak kenaikan harga gas dan penurunan posisi Petrobras menjadi sebatas penyedia jasa bagi YPFB.

Pada awal masa negosiasi Bolivia tampak ingin menunjukkan keteguhan dari kebijakannya, yaitu dengan melakukan ancaman terhadap Brazil, seperti apa

yang dilakukan oleh Morales dan Andres Soliz. Kedua tokoh ini ingin meningkatkan posisi tawar Bolivia atas Brazil yang notababene merupakan pemimpin regional Amerika Selatan. Tujuan Bolivia ini menjadi kurang tepat karena pada perkembangannya Brazil yang semula tampak bekerjasama ternyata berbalik semakin memperkuat komitmennya terhadap hak-hak yang didapatkan Petrobras dalam kontrak lama. Ancaman Bolivia yang pada dasarnya beresiko ini dalam perkembangannya telah menyebabkan hubungannya dengan Brazil sempat mengalami krisis beberapa kali.

Namun pada akhirnya, kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan negosiasi guna mempertahankan ikatan kerjasama antara Petrobras dengan YPF. Sikap ini pada dasarnya muncul karena kesadaran masing-masing pihak bahwa dengan melanjutkan kerjasama, kepentingan politik maupun ekonomi akan lebih terjamin daripada mengakhiri kerjasama dan melegalkan konflik semakin panjang dan meluas.

Besarnya taruhan yang dimiliki oleh Petrobras dan Brazil dalam kerjasama dengan Bolivia pada dasarnya tidak terletak pada besarnya investasi dan kerugian yang dapat diakibatkan dari pengambilalihan asset-aset Petrobras di Bolivia, namun pada besarnya ketergantungan energi Brazil terhadap gas Bolivia, khususnya pasokan gas alam bagi industri domestik. Meningkatnya permintaan gas domestik Brazil menyebabkan Brazil untuk mau tidak mau tetap menggantungkan kebutuhan gasnya kepada Bolivia. Bolivia melalui model kebijakan ekonomi Morales, tampak sudah menyadari pentingnya investor asing bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Bolivia, terutama Brazil. Brazil

merupakan pasar yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi Bolivia.

Pada akhirnya, kesepakatan yang dicapai antara Petrobras dan Bolivia merupakan hasil negosiasi. Masing-masing pihak bersedia mencari titik temu sehingga tercapai kesepakatan. Ketentuan-ketentuan yang harus dicapai dalam kontrak antara kedua pihak diterima pada akhirnya dapat diterima. Brazil sepakat untuk membayar pajak dan royalti sebesar 82% kepada Bolivia. Petrobras pun mendapatkan kompensasi atas pabriknya yang harus dibayarkan oleh pemerintah Bolivia sebesar US\$ 112 juta.

Penaikan harga ekspor gas dari US\$ 3,80/MBTU menjadi US \$ 4,2/MBTU semula dianggap merugikan Petrobras. Namun pada dasarnya masih lebih rendah dari kenaikan harga yang dikenakan pada Argentina yang berada pada tingkat US \$ 5/MBTU. Harga yang telah disepakati tersebut secara umum masih jauh dari harga gas di pasar internasional yang mencapai US \$ 7/MBTU. Lagipula Petrobras sudah lama merasakan keuntungan yang luarbiasa dari Bolivia selama kebijakan kapitalisasi diberlakukan.

Nasionalisasi Bolivia yang difokuskan pada tujuan ekonomi dan politik pada perkembangannya telah mampu mengamankan posisi Morales dan mengangkat perekonomian Bolivia. Jika Bolivia memang melakukan nasionalisasi secara radikal maka resiko yang muncul pasti akan lebih besar. Hal ini sudah pasti menimbulkan protes yang lebih besar dari pihak luar, membahayakan aliran investasi asing, membahayakan hubungan diplomatik dan sangat berpotensi membawa Bolivia menuju ke hadapan badan arbtrasi internasional.

penghormatan kepada Bolivia atas kebijakan nasionalisasinya terhadap kekayaan alamnya, karena pada dasarnya hal tersebut juga terdapat dalam konstitusi Brazil. Bolivia pun meskipun ngotot melakukan nasionalisasi, namun Bolivia tidak menjalankan kebijakan dengan ektrim. Hal ini tampak dalam hasil negosiasi dimana Bolivia memberikan ijin kepada Brazil untuk tetap menggunakan asetnya di Bolivia dalam pengeksplorasian hidrokarbon Bolivia setelah nasionalisasi dijalankan.

Dalam resolusi konflik, perlu adanya perubahan institusi yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik. Perubahan institusi ini tampak ketika Morales merombak kabinetnya setelah Resolusi Hidrokarbon dikecam dan ditolak Brazil dengan disusul ancaman pengajuan ke badan arbitrase internasional. Perombakan ini dilakukan demi proses negosiasi yang kondusif antara Bolivia dan Brazil.

Pada akhirnya, untuk menghindari konflik terbuka yang lebih membahayakan di antara YPF-Bolivia dan Petrobras-Brazil dalam konflik hidrokarbon, resolusi konflik dengan jalan negosiasi merupakan solusi terbaik dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu konflik, sehingga tidak ada kesempatan bagi meluasnya tingkatan konflik. Hasil negosiasi tersebut merupakan hasil dari proses negosiasi dengan pendekatan win-lose dimana Bolivia menjadi pihak pemenang dan Brazil menjadi pihak yang kalah.